

**RESPON MAHASISWA TERHADAP ETIKA POLITIK
HERMAN HASANUSI SEBAGAI WALI KOTA BANDAR
LAMPUNG PERIODE 2010-2021**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Filsafat Politik Islam**



oleh:

Zanjabil Al Falah
NIM: E04213115

**PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Zanjabil Al-Falah

NIM : E04213115

Jurusan : Prodi Politik Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli 2018

Saya yang menyatakan



ZANJABIL AL FALAH

NIM : E04213115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zanjabil Al Falah
NIM : E04213115
Judul : **Respon Mahasiswa Terhadap Etika Politik Herman
Hasanusi Sebagai Wali Kota Bandar Lampung 2010-
2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 Juli 2018

Pembimbing



Dr. H. Ainur Rofiq Al Amim, SH, M. Ag

NIP : 1972062522005011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Zanjabil Al Falah telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 25 Juli 2018

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Pt. Dekan,



Dr. Suhermanto, M. Hum.
NIP. 1972062522005011007

Tim Penguji :
Ketua:

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. H. Ainur Rofiq Al Amim, SH, M. Ag.

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amim, SH, M. Ag
NIP. 197711032009122002

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, belonging to Andi Suwarko S.Ag, M.Si.

Andi Suwarko S.Ag, M.Si
NIP. 197411102003121004

Penguji I

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Ismail, MH, S.Sos, M.Si.

Dr. Ismail, MH, S.Sos, M.Si
NIP. 196005211986081001

Penguji II

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Abd. Chalik, M.Ag.

Dr. Abd. Chalik, M.Ag
NIP. 19730627200003100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zanjabil Al Falah
NIM : F04213115
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat
E-mail address : zanjabil358@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Respon Mahasiswa Terhadap Etika Politik Herman Hasanusi Sebagai Wali

Bandar Lampung Periode 2010- 2021

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Penulis

(Zanjabil Al Falah)

ABSTRAK

Etika politik dan kekuasaan yang diterapkan oleh Wali Kota Bandar Lampung dalam pemerintahan kurang begitu baik karena masih terkesan mendahulukan ambisius dan kepentingan pribadi juga golongan terbukti dengan selalu munculnya nama Herman HN dalam dua kali pilgub belakangan sedangkan di waktu yang bersamaan yang bersangkutan sedang menjabat sebagai Wali Kota aktif untuk wilayah Bandar Lampung dengan demikian menarik untuk di teliti dari sudut bagaimana respon mahasiswa terkait hal itu.

Skripsi yang berjudul “Respon Mahasiswa Terhadap Etika Politik Herman Hasanusi Sebagai Wali Kota Bandar Lampung Periode 2010-2021” adalah hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian ini memunculkan dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana etika politik Wali Kota Bandar Lampung dalam perspektif himpunan mahasiswa Lampung Surabaya (Himalaya) dan Bagaimana dampak etika politik Wali Kota Bandar Lampung dalam perspektif himpunan mahasiswa Lampung Surabaya (Himalaya). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika politik dan kekuasaan yang diterapkan Wali Kota Bandar Lampung dalam perspektif himpunan mahasiswa Lampung Surabaya. Penelitian kualitatif ini menggunakan etika yang memberi gambaran umum rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.

Temuan peneliti terkait respon mahasiswa terhadap etika politik Herman Hasanusietika sebagai Wali Kota Bandar Lampung 2010-2021 berasumsi bahwa dalam kehidupan sosial sehari-hari Herman HN adalah sosok pemimpin yang baik karena secara sosial dalam bergaul dengan masyarakat menurut para narasumber seorang Herman HN mampu memahami kebutuhan rakyat mulai dari kebutuhan yang mendasar seperti pendidikan dan kesehatan juga beberapa infrastruktur yang ada di Bandar Lampung.

Sedangkan terkait etika politik yang di terapkan oleh Herman HN dalam pemerintahannya menurut para narasumber di nilai masih kurang karena belum begitu menegdepankan cara yang beretika terbukti dengan banyaknya indikator etika pejabat publik yang dilanggar oleh Herman HN mulai dari nilai transparansi dengan melarang wartawan meliput area sekitar kantor pemkot Bandar Lampung sampai pada nilai tanggung jawab yang seolah-olah digampangkan terbukti dengan majunya beliau dua kali pilgub saat beliau sedang menjabat Wali Kota. Sedangkan dampaknya sangat tidak menggembirakan mulai dari hilangnya keterbukaan pemerintah yang membuat masyarakat kehilangan haknya untuk mengkontrol pemerintah sampai terbengkalainya berbagai macam tugas Wali Kota karena fokusnya terbagi antara mengurus Kota Bandar Lampung dan mensukseskan pilgub.

Kata kunci : Etika Politik, Dampak Etika Politik, Wali Kota

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis.....	4
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Konseptual dan Teoritik	7
a) Pengertian Dasar.....	7
b) Gambaran Umum tentang Etika Politik	12
c) Sejarah Etika Politik.....	16
G. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Penelitian.....	23
2. Lokasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Metode Penelitian.....	25
5. Teknik Pengumpulan Data	25
6. Teknik Pemilihan Informan.....	26
7. Teknik Analisis Data	26
8. Teknik Keabsahan Data.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II.....	31
SETTING PENELITIAN.....	31
A. Lampung	31
B. Bandar Lampung.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika adalah sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental, bagaimana saya harus hidup dan bertindak. Sedangkan kekuasaan adalah merupakan usaha seorang individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Etika dan Kekuasaan merupakan kedua hal yang amat penting posisinya dalam bingkai politik. bahkan kedua istilah ini sudah dibahas semenjak zaman Yunani kuno, karena keduanya dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, karena bila kedua istilah ini dipergunakan tidak dalam kapasitasnya hal ini akan berakibat pada ketidak stabilan sebuah Negara atau bahkan melahirkan sebuah pemberontakan. Satu keyakinan yang selalu ada dalam pandangan etika, bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Politik dalam pandangan etika tidak lebih dari suatu alat, sama dengan negara itu sendiri, hanyalah suatu alat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam sebuah negara.¹

Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (MPR) No VI tahun 2001 tentang kehidupan berbangsa. Dalam ketetapan tersebut berbunyi bahwa etika kehidupan berbangsa dan tidak terkecuali juga kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila sebagai acuan dasar dalam berfikir, bersikap dan bertindak laku, dalam kehidupan berbangsa.

¹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm. 113.

Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun untuk membantu memberikan kesadaran dengan arti penting tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.²

Berkaitan dengan persoalan di atas, penulis ingin membahas Herman Hasanusi atau yang lebih dikenal sebagai Herman HN (lahir di Menggala, 17 Mei 1956, umur 61 tahun) adalah wali kota Bandar Lampung periode 2010 hingga 2015 dan periode 2016 sampai 2021. Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung dengan Zainudin Hasan pada pemilihan umum gubernur Lampung 2013 namun suaranya cukup terpaut jauh dengan pasangan Ridho - Bachtiar.³

Setelah kalah mencalonkan diri pada pilgub Lampung 2013 ia kembali meneruskan jabatannya sebagai Wali Kota kemudian memenangkan pemilihan Wali Kota untuk periode 2016 sampai 2021 dan pada pilgub 2018 kali inipun Herman HN mencalonkan diri sebagai gubernur Lampung diusung oleh PDIP yang memiliki 17 kursi di legislatif, yang kemudian sangat menarik di jadikan permasalahan adalah etika politik Herman HN selaku Wali Kota Bandar Lampung jika dua kali ia menjabat dan dua kali pula ia maju pilgub Lampung, seakan-akan jabatannya tak berarti apa-apa sehingga mudah dilepas untuk ditukar dengan jabatan yang lebih tinggi lagi.

Himpunan mahasiswa Lampung Surabaya, gabungan dari mahasiswa berbagai universitas dan institut dengan dasar pendidikan yang berbeda-beda yang terdapat di Surabaya, merupakan wadah para mahasiswa asal Provinsi Lampung

² Ketetapan Mpr No VI tahun 2001”<http://www.Mpr.go.id/Tap-Mpr-No-vi2001-Tentang-Etika-Kehidupan-Berbangsa>, di akses tanggal 23-01- 2018 pukul 22.26

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Herman_HN di akses tanggal 25-01-2018 pukul 19.03

yang sudah menjadi keharusan secara alam bawah sadar sebagai motivasi untuk mengemban julukan *agent of change* peduli terhadap situasi tanah kelurahan ini ialah Provinsi Lampung selain itu juga ternyata dalam sampel awal beberapa anggota merupakan individu yang lahir dan dibesarkan di Lampung tempat Herman HN menjadi Wali Kota dua periode sebelumnya. Sehingga dengan pertimbangan begitu para responden tahu dan peduli mengenai Herman HN selama menjabat Wali Kota Bandar Lampung.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah mengenai studi etika politik dan kekuasaan Wali Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah mengenai studi etika politik dan kekuasaan Wali Kota Bandar Lampung dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana etika politik Wali Kota Bandar Lampung dalam perspektif Himpunan Mahasiswa Lampung Surabaya (Himalaya)?
2. Bagaimana dampak etika politik Wali Kota Bandar Lampung dalam perspektif Himpunan Mahasiswa Lampung Surabaya (Himalaya)?

C. Tujuan Penelitian

itian
 angan dengan tujuan penelitian di atas. Mak
 apa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai beri
 kritis
 rkaya literatur serta bahan kajian ilmu polit
 hngan keilmuan.
 luas jangkauan wawasan para mahasiswa-mahas
 angka untuk menyalurkan pemahaman dan inte
 wa-mahasiswi dibidang akademis.
 an ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan

- ur serta bahan kajian
muan.
uan wawasan para maha

...tujuan penelitian di atas. Maka
...manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
...ritis
...kaya literatur serta bahan kajian ilmu politik
...hubungan keilmuan.
...luas jangkauan wawasan para mahasiswa-mahasis
...angka untuk menyalurkan pemahaman dan inte
...wa-mahasiswi dibidang akademis.
...an ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan

ur serta bahan kajian
muan.
uan wawasan para maha

- ur serta bahan kajian
muan.
uan wawasan para maha

- Ali Syari'ati. Metode yang digunakan adalah (analisa) yang masuk dalam kategori penelitian sumber datanya dikumpulkan dengan memanfaatkan media yang berkaitan dengan permasalahan penelitian media masa ataupun jurnal. Kesimpulan yang di mengejawantahkan islam sebagai kerangka dasar politik.
- Aspektual dan Teoritik**
- ini pemahaman etika dan politik ibarat air untuk dipertemukan dalam posisi yang sama.

ataupun jurnal. Kesimpulan

kan islam sebagai kera

Aspektual dan Teoritik

ini pemahaman etika dan politik ibarat air untuk dipertemukan dalam posisi yang sama.

...n etika dan politik ibarat air
...nukan dalam posisi yang sama.

Kata etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani yang mempunyai arti dalam bentuk tunggal; tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “ta etha” yang artinya adalah adat kebiasaan.⁴ Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu.⁵

Pendapat lain mengatakan etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu bukan sebuah ajaran. Apabila etika menjadi penelitian sistematis dan metodis, maka etika disini sama artinya filsafat moral.⁶

Emile Durkhem mendefinisikan pengertian moral meliputi tiga unsure; Pertama, unsur moral adalah semangat disiplin. Kedua, keterikatan pada kelompok sosial; moral berarti aktivitas yang impersonal (tidak mengenai orang tertentu). Ketiga, otonomi penentuan nasib; otonomi menyangkut keputusan pribadi dengan mengetahui sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.⁷

Kata lain dari etika adalah akhlak, dari bahasa arab. Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti yang merupakan kata

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, 1990), 592

⁷ Emile Durkhem, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990), Cet. Ke-1, xi

Ada pendapat yang mengatakan bahwa akhlak adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan ikhtiar dan sengaja, ia mengetahui waktu melakukan apa yang diperbuat.¹⁰ Inilah yang dapat diberi hukum “baik dan buruk”, dengan arti lain akhlak adalah kebiasaan dan kehendak. Selain itu akhlak mengandung arti sifat yang tertanam dalam jiwa, tanpa membutuhkan atau memerlukan pemikiran dan pertimbangan untuk kemudian memilih melakukan dan meninggalkan.¹¹

⁸ Rahmat Jatnika, Sistem Etika islam; Akhlak Mulia, (Surabaya: Pustaka Islam, 1985), 25

⁹ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI, 2001), Cet. Ke-4, 1

¹⁰ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), Cet. Ke-8, 5

¹¹ Yunahar, Ilvas, *Kuliah Akhlak*, 3

¹² Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), Cet. ke-2, 9

2. Pengertian Politik

¹³ Yunahar, Ilyas, *Kuliah Akhlak*, 3

¹⁴ Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1, 19

¹⁵ *Ibid*, 19

Sama halnya dengan pendapat di atas, Ramlan Subakti mengatakan bahwa sekurang-kurangnya ada lima pandangan mengenai politik. Pertama, pandangan klasik yang mengatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik secara kelembagaan, artinya politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan. Ketiga, politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai fungsionalisme, yaitu politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik,

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 9-13

Di Dunia Timur, dipergunakan istilah siyasah sebagai pengganti istilah politik. pemakaian kata Siyasah jauh lebih tua dari perkataan politik, namun kepopuleran dan keluasan pemakaiannya tidak mengimbangi perkataan sesudah itu. Siyasah berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar dari kata sasa yasusu berarti kepemimpinan. Dalam pengertian bahwa siyasah adalah ilmu pemerintah, yaitu kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Dia harus dipegang oleh orang yang mengerti betul tentang dasar-dasar pengetahuan dan peraturan-peraturan dalam Negara.²⁰

Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora). Sebagai cabang falsafah ia membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu ia membahas bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sebagai ilmu dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip umum yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dalam falsafah Barat dan Timur, seperti dalam Islam, aliran-aliran pemikiran beraneka ragam. Tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Kausar, 1999), Cet. Ke-1, 35

Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajibannya dan tanggungjawabnya terhadap Tuhannya. Etika sosial di lain hal membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara.²²

Sebagai cabang – cabang etika lain, etika politik meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya merupakan individu dan anggota sosial, sekaligus merupakan pribadi merdeka, juga sebagai makhluk Tuhan. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang beradab dan berbudaya, yang tidak bisa hidup di luar adab dan

²² K. Bertens, *Etika* (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), 5

Dengan demikian pengertian 'politik' yang diletakkan kepada etika politik mengandung pengertian yang luas, bukan pengertian yang sempit seperti dibahas dalam ilmu politik. Kata-kata politik, dari kata politics dalam bahasan Yunani, mempunyai arti khusus dalam ilmu politik. Ia dikenakan biasanya kepada anekaragam kegiatan dalam masyarakat berkenaan dengan system politik tertentu yang dianut oleh negara di mana suatu masyarakat atau bangsa itu hidup. Maka kegiatan politik selalu dihubungkan dengan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara tentang berbagai hal menyangkut kepentingan publik, serta kegiatan-kegiatan lain dari berbagai lembaga sosial, partai politik dan organisasi keagamaan yang berkaitan langsung dengan kehidupan kemasyarakatan dan negara.

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), 1

[illegible]

Hukum terdiri dari norma-norma bagi tindakan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan. Tetapi hukum hanya bersifat normative, dan tidak dengan sendirinya menjamin masyarakat mentaatinya. Oleh karena itu yang secara efektif menentukan perilaku dan tindakan masyarakat ialah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara. Hukum tanpa kekuasaan negara adalah sesuatu yang tidak bermakna, sebab hukum hanya bisa dilaksanakan dalam konteks kekuasaan negara atau lembaga hukum yang diberi wewenang oleh negara. Sebaliknya negara tidak bias berbuat apa-apa tanpa landasan hukum yang jelas dan disepakati bersama. Negara seperti halnya hukum memerlukan legitimasi dan itu ada di tangan rakyat. Etika politik membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan obyek formal etika, yaitu tinjauan kehidupan politik berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika. Obyek materialnya meliputi legitimasi negara, hukum, kekuasaan dan penilaian kritis terhadap legitimasi-legitimasi tersebut.²⁵

15

Pada perkembangan sejarah etika politik kekinian, tampaknya semangat moral muncul kembali. Banyak ilmuwan, politisi dan pengamat yang berpaling kepada ilmu- ilmu sosial untuk mencari jawaban kerumitan standar tindakan yang etis dan bermoral. Dengan demikian, etika menjadi sejumlah keyakinan yang ada pada masyarakat, juga sejumlah kecenderungan pribadi. Hal ini mendorong tidak saja mempelajari etika moral yang sudah ada, melainkan juga mencari landasan baru bagi etika itu sendiri. Banyak orang berpaling kepada tradisi dan agama untuk mencari bimbingan dalam memecahkan masalah etika. Dua bidang ilmu ini memiliki keterbatasan, sehingga nilai-nilai agama dan tradisi seringkali tumpang tindih. Tradisi bisa menjadi bagian dari nilai moral yang ada pada agama, begitu juga sebaliknya, agama bagian dari tradisi yang sumber nilainya masih diberlakukan.²⁶

²⁶ Virginia, Held, *Etika Moral;Pembenaran Tindakan Sosial*, Penerjemah Drs.Y Ardy Handoko, Cetakan kedua (Jakarta; Erlangga, 1991), 9

Sejarah pemikiran etika politik jauh hari sudah ada, bahkan sebelum adanya Negara yang mengatur tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Para filosof politik klasik berusaha menjawab tentang struktur-struktur organisasi mana yang paling baik. Dalam hal ini, Plato dan Aristoteles sama-sama mempertanyakan Negara yang baik. Bagi Plato, Negara yang baik adalah Negara yang merealisasikan keadilan, yang ditata secara selaras dan seimbang, dengan pimpinan yang berorientasi pada idea metafisik kebaikan. Dia yakin bahwa, etika politik seperti itu paling sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat dan dengan demikian paling menunjang kebaikan masyarakat.

²⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, 12

[illegible]

kedua filsuf ini jelas, yakni Negara yang paling baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Motivasi harapan tersebut merupakan suatu penilaian etis yang kebijaksana.²⁹

Dalam fase filsafat politik (etika politik) Yunani belum mengenal tuntutan legitimasi kekuasaan. Penguasa hanya dihimbau untuk berlaku bijaksana. Hal ini masih sekedar himbauan moral terhadap penguasa. Faham bahwa kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara etis masih asing dibicarakan. Bangunan etika politik waktu itu belum merefleksikan nilai transendental dan sama sekali belum memahami maksud dari kesejahteraan. Dalam filsafat moral ini, yang dianggap paling mulia dalam manusia bukanlah dia sendiri, melainkan logos, dan partisipasi untuk hal itu. Bertolak

bukanlah dia sendiri, melainkan logos, dan partisipasi untuk hal itu. Bertolak dari itu kemudian berkembang terhadap pemikiran yang mengajukan tuntutan legitimasi etis. Dalam fase ini legitimasi etis menjadi sorotan dalam perbincangan etika politik. Seorang neo-platonisme, Augustinus mengajukan bahwa legitimasi etis terdapat dalam negara, yang dibedakan menjadi dua; yaitu Negara Allah dan Negara duniawi.³⁰ Pertama adalah negara Allah yang akan mencapai kesempurnaan pada akhir zaman, sedangkan kedua, adalah

ans Magnis Suseno, *Etika Politik*, 190
ans Magnis Suseno, *Etika Politik*, 194

³⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, 194

jikalau tidak bertentangan dengan hukum kodrat. Begitu Negara hanya legitimit asalkan sesuai dengan norma-norma.

Dapat diringkas bahwa, Negara yang tidak berdasarkan akan bertentangan dengan moral. Hukum ini tidak mem Negara, melainkan mejadi dasarnya. Inti filsafat Negara adalah bahwa eksistensi Negara bersumber dari kodrat menolak anggapan Augustinus, bahwa Negara hanya perlu manusia. Ia kembali pada etika politik Yunani klasik berdasarkan suatu kebutuhan kodrat manusia. Thomas A tujuan Negara pada tujuan manusia, dengan menjadi ke sangat penting dalam Negara.

lainnya mejadi dasarnya. Inti filsafat politik adalah bahwa eksistensi Negara bersumber dari kebutuhan manusia.anggapan Augustinus, bahwa Negara ada karena manusia. Ia kembali pada etika politik Yunani kuno yang berdasar pada suatu kebutuhan kodrat manusia. Negara ada karena manusia, dengan tujuan manusia, dengan kekuasaan yang tertinggi dalam Negara.

Bagi Thomas Aquinas, Negara merupakan realitas yang positif dan rasional. Positif sesuai dengan kodrat manusia, yang mengakui dan bersedia menaatinya. Negara tidak ditaati karena orang takut terhadap ancamannya, melainkan karena fungsi dan wewenangnya dimengerti. Thomas Aquinas meletakkan dasar untuk bersifat kritis terhadap Negara.

³³ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik*, 198.

gagasan “pembagian kekuasaan”, Rousseau dengan pemikiran “negara hukum”, dan Khan dengan ide tentang “negara hukum republikan”.³⁴

Dalam dunia Islam, realitas politik dan adanya kondisi tersebut mendorong para filosof dan para ahli politik Islam untuk menetapkan aturan-aturan pemilihan seorang pemimpin pemerintahan dan membentuk negara ideal. Dalam beberapa karya tulis misalnya, dalam karyanya, Al-Madiinah Al-Faadhilah, Ibnu Maskawih dalam karyanya Al-Akhlak, dan Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkaam Al-Sultaniyah. Ini artinya, para pemikir Islam menyadari betapa Islam memerintahkan untuk menciptakan dan mengembangkan negara ideal dan ajaran politik Islam.

endorong para filosof dan para ahli politik Islam
an pemilihan seorang pemimpin pemerintahan d
eal. Dalam beberapa karya tulis misalnya, Al-
Al-Madiinah Al-Faadhilah, Ibnu Maskawih dalam
, dan Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkaam
para pemikir Islam menyadari betapa Islam mem
an dan mengembangkan negara ideal dan ajar

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Respon Mahasiswa Terhadap Etika Politik Herman Hasanusi Sebagai Wali Kota Bandar Lampung Periode 2010-2021”. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,

³⁴ Franz Magnis Suseno, artikel ini di tulis dari makalah kuliah umum "Sekitar etika Politik", (Yogyakarta: UGM, 27 Agustus 2007)

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁵ Metode ini menggunakan analisis proses dan makna lebih diperdalam dalam penelitian kualitatif, penelitian ini juga harus fokus kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat *holistic* (utuh) dan sistematis terkait dengan suatu keseluruhan, tidak bertumpu pada pengukuran sebab penjelasan mengenai suatu gejala diperoleh melalui pelaku yang dalam hal ini adalah sasaran penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 6.

[illegible]

Asrama Mahasiswa Lampung Surabaya yang terletak di Jalan Dukuh Pakis II nomor 29 Surabaya

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 yakni sebagai berikut:³⁸

Sumber primer dalam penelitian ini adalah informan secara langsung memberikan informasi dan data kepada peneliti. Sumber primer penulis dapatkan dari informan yang memberi data dan informasi yang berasal dari wawancara langsung kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang terlibat.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data ini digunakan sebagai pendukung data primer yang didapatkan langsung dari proses wawancara maupun observasi langsung di lapangan. Sumber data

³⁸ Jonanthan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), Hlm 224.

sekunder ini diharapkan mampu memberikan keterangan pelengkap sebagai pembangding dari data yang berasal dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis dapatkan dari literature dan dokumentasi.

4. Metode Penelitian

Sehubungan dengan lokasi penelitian, maka peneliti menentukan informan menggunakan metode Purposive Sampling, dimana peneliti memilih informan menurut kriteria yang telah ditetapkan, selain itu yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian serta sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian yakni:

a. Metode Wawancara

Metode ini adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dari para mahasiswa yang menjadi anggota himpunan mahasiswa Lampung Surabaya tentang kepemimpinan Herman HN. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* atau wawancara mendalam.³⁹ Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap

³⁹ *Ibid*, Hlm 225.

muka secara langsung agar mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang penulis peroleh langsung dari lapangan. Data-data dan dokumentasi tersebut penulis pilih yang berkaitan langsung dengan etika politik Wali Kota Bandar Lampung Periode 2010-2021.

6. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling*, artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Lokasi penelitian yang bertempat di asrama mahasiswa Lampung Surabaya. Sehingga mereka akan dapat memberikan informasi secara tepat tentang etika politik Wali Kota Bandar Lampung periode 2010-2021. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berikut:

- Anggota aktif Himpunan Mahasiswa Lampung Surabaya

7. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan

Analisis data disini merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola atau kategori dan uraian satuan dasar sehingga lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data bertujuan untuk menelaah data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang antara lain : observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah data diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian kualitatif deskriptif yang berupaya menggambarkan kondisi latar belakang penelitian secara menyeluruh dan data tersebut ditarik suatu temuan penelitian.⁴¹

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan, dan abstraksi data yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian. Dalam reduksi data penulis memusatkan tema dan membuat batas-batas permasalahan. Proses ini terus berjalan sampai penelitian selesai.
- b. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), Hlm 92-99.

mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap pengambilan keputusan, dimana peneliti dapat menarik kesimpulan terakhir berdasarkan data yang didapat.

8. Teknik Keabsahan Data

Data yang diperoleh dalam lapangan untuk menjamin keabsahan dalam data penelitian kualitatif, terdapat beberapa ukuran atau kriteria utama untuk menjamin kebenaran data yang diperoleh. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁴³

Sedangkan Patton mendefinisikan triangulasi adalah sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber yang dicapai dengan cara membandingkan data hasil wawancara informan di atas dengan data yang sudah ada sebelumnya.⁴⁴ Peneliti juga menggunakan teknik dimana peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber (informan), hingga data tersebut bisa

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm 178.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. Alfabeta: 2015), Hlm 127.

BAB II

SETTING PENELITIAN

A. Lampung

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, Ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki 2 Kota dan 15 Kabupaten. Kota yang dimaksud adalah Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah "Radin Inten II", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan tiga Bandar Udara perintis yaitu : Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di Krui, Pesisir Barat, Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra.

Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur – Barat berada antara : $103^{\circ} 40' - 105^{\circ} 50'$ Bujur Timur Utara – Selatan berada antara : $6^{\circ} 45' - 3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan Sedangkan di Teluk Semaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.⁴⁵

⁴⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung> (Minggu, 15 April 2018, 18.30)

adap penduduk perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Lampung tahun 2017 mencapai 237 jiwa/km². Kepadatan Penduduk Kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Bandarlampung dengan kepadatan sebesar 3.371 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 52 jiwa/Km². . Sementara itu jumlah penduduk Lampung mengalami pertumbuhan sebesar 1,84 persen dari tahun 2015.

Lampung mempunyai karakter yang majemuk. Karakter ini terbangun dari keragaman etnis yang hidup di Lampung. Selain bangsa (etnis) Lampung juga penduduk pendatang yang berasal dari Bali dan Jawa atau migrasi dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migrasi dari daerah lainnya.

sisir Barat sebesar 52 jiwa/km². . Sementara itu, laju pertumbuhan sebesar 1,84 persen dari tahun 2010-2019 mempunyai karakter yang majemuk. Karakter ini dipengaruhi oleh etnis yang hidup di Lampung. Selain bangsa asli, terdapat pendatang yang berasal dari Bali dan Jawa Barat, Jawa Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, dan lain-lainnya.

Program transmigrasi sejak tahun 1905 lah yang membawa berbagai macam etnis masuk ke tanah Lampung. Tidak dipungkiri bahwa kondisi masyarakat yang begitu beragam mampu memicu terjadinya pergesekan antar kelompok. Beberapa kali nama provinsi Lampung menjadi sorotan akibat adanya permasalahan

pertikaian antar warga. Tetapi hal ini tidak dapat dianggap sebagai patokan bahwa Lampung tidak aman.⁴⁶

Sedangkan untuk pemilihan gubernur selama dua periode terakhir yaitu 2013 dengan pemenang Rido-Bakhtiar yang di usung oleh Demokrat dan PKS keluar sebagai pemenang sedangkan di pilgub 2018 di menangkan oleh Arinal-Nunik yang di usung oleh Golkar, PKB dan PAN.

Sedangkan untuk partai dengan dukungan terbanyak di Provinsi Lampung masih di pegang oleh partai PDI P dengan 17 kursi di dewan legislatif namun agaknya gelombang pemilih PDI P mulai surut terbukti dengan tidak terpilihnya Herman HN pada pilgub tahun ini meski bisa maju tanpa partai koalisi karena sudah memiliki 17 kurdi di anggota dewan.

B. Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung (Aksara Lampung: ꦏꦠꦤ꧀ꦨꦢꦫꦭꦩꦁ) adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.

Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting

⁴⁶ Sisi lain kemajemukan masyarakat Lampung https://www.kompasiana.com/haera_ice/sisi-lain-kemajemukan-masyarakat-lampung_5518a8ea813311a2689deaef (sabtu, 14 April 2018, 20.32)

Secara geografis, Telukbetung berada di selatan Tanjungkarang, karena itu di marka jalan, Telukbetung yang dijadikan patokan batas jarak ibukota provinsi. Telukbetung, Tanjungkarang dan Panjang (serta Kedaton) merupakan wilayah tahun 1984 digabung dalam satu kesatuan Kota Bandar Lampung, mengingat ketiganya sudah tidak ada batas pemisahan yang jelas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah

2. Kondisi Demografis Kota Bandar Lampung

Berdasarkan sensus BPS, di tahun 2016 kota ini memiliki populasi penduduk sebanyak 1.251.642 jiwa (sensus 2016), meningkat dari tahun 2015 sebanyak 1.166.761 jiwa dengan luas wilayah sekitar 197,22 km², maka Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 8.316 jiwa/km² dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79 % per tahun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk dari tahun ke tahun:

Tahun	1971	1980	1990	2000	2008	2009	2010	2011	2013	2015	2030
Jumlah penduduk	198.427	284.275	636.418	743.109	822.880	833.517	881.801	922.808	1.101.101	1.166.761	2.400.000 <i>(perkiraan)</i>

Sejarah kependudukan kota Bandar Lampung

Sumber: [Badan Pusat Statistik](#)

Tabel 1 Jumlah penduduk dari tahun ke tahun

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kota Bandar Lampung per kecamatan pada tahun 2016:

No	Kecamatan	Jumlah penduduk
1.	Kedaton	72.953 jiwa
2.	Sukarame	73.443 jiwa
3.	Tanjung Karang Barat	74.157 jiwa
4.	Tanjung Karang Pusat	72.195 jiwa
5.	Tanjung Karang Timur	56.284 jiwa
6.	Teluk Betung Utara	62.611 jiwa
7.	Teluk Betung Barat	35.951 jiwa
8.	Teluk Betung Selatan	49.916 jiwa
9.	Teluk Betung Timur	52.765 jiwa
10.	Bumi Waras	68.030 jiwa
11.	Kedamaian	49.840 jiwa
12.	Enggal	40.660 jiwa
13.	Langkapura	29.024 jiwa
14.	Panjang	96.287 jiwa
15.	Kemiling	81.122 jiwa
16.	Rajabasa	81.122 jiwa

17.	Labuhan Ratu	60.692 jiwa
18.	Sukabumi	69.621 jiwa
19.	Tanjung Senang	54.873 jiwa
20.	Way Halim	92.163 jiwa
	Jumlah	1.251.642 jiwa

Tabel 2 Jumlah penduduk Bandar Lampung per kecamatan

3. Geografi Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa.

Pada umumnya kendaraan tersebut transit di terminal Rajabasa. Keluar dan masuknya kendaraan baik bus, angkutan kota maupun minibus ke terminal ini, ternyata mampu mendatangkan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kota Bandar Lampung yang pada tahun anggaran 200 mencapai Rp 11,9 milyar. Angkutan jalan raya mampu menyumbang Rp 273 milyar dari total kegiatan ekonomi tahun 2000. Sumbangan lapangan usaha ini paling besar dibanding angkutan lain misalnya air.

Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar Lampung ini menambah padatnya jalan-jalan kota. Sejalan dengan perkembangan kota, kendaraan pribadi maupun umum pun semakin menjamur, ditambah lagi dengan kendaraan pengangkut hasil bumi dari pelosok daerah Propinsi Lampung yang akan dikirim ke Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan provinsi.

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20'-50°30' LS dan 105°28'-105°37' BT dengan luas wilayah 192.96 km² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.
- Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan.
- Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan.
- Batas Barat : Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan.⁵¹

Mayoritas penduduk kota Bandar Lampung berasal dari etnis Jawa (79,12%). Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Bandar Lampung yaitu etnis Sunda (10,72%) Lampung dan Bali (2,42%). Orang Jawa di Bandar Lampung tersebar di hampir semua kawasan kota dan umumnya telah membaaur dengan orang dari etnis lain, sedangkan orang Bali lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman Bali di Bandar

39

Masyarakat Bandar Lampung yang plural menggunakan berbagai bahasa, antara lain: bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Minang, Bahasa Batak dan bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung.⁵³

5. Kondisi Sosial Politik Kota Bandar Lampung

Praktik jual beli suara, akan menyebar secara merata di daerah-daerah terutama yang banyak masyarakat miskinnya. Penyebab maraknya politik uang juga tak lepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah, baik dari masyarakat maupun dari pihak calon kepala daerahnya dan itulah yang hari ini masih terus terjadi di Bandar Lampung, bukan hanya di Bandar Lampung tapi kota-kota lainpun masih banyak yang memperaktekkan kasus politik uang.

⁵⁵ <http://irwanteasosial.blogspot.com/2015/09/penyebab-terjadinya-money-politic.html>
(Senin, 02 Juli 2018, 17.15)

Ditambahkan olehnya, arus deras gelombang perpolitikan sembako tersebut memang harus dilawan untuk dihentikan. “Jujur saja, golongan kuat yang mampu menghadapi situasi itu adalah mahasiswa. Saya dan masyarakat banyak sangat berharap pada mahasiswa untuk menjadi lokomotif membawa pada arah perbaikan. Oleh karenanya kalian sebagai mahasiswa harus membekali diri dengan terus memperkuat karakter diri dengan mengubah pola pikir,” ungkap Dang Ike.⁵⁶

1. Fauzan Sibron (NasDem)
2. Hantoni Hasan (PKS)
3. Eva Dwiana (PDIP)
4. Apriliati (PDIP)
5. Azwar Yacub (Golkar)
6. Andika Wibawa (Gerindra)
7. Hartarto Lojaya (Demokrat)

⁵⁷ <http://lampung.tribunnews.com/2014/09/01/85-anggota-dprd-lampung-terpilih-dilantik-hari-ini> di akses tanggal 30-07- 2018 pukul 03.05

8. Imer Darius (Demokrat)
9. Muswir (PAN)
10. MC Iman Santoso (PPP)
11. Angga Jevi Surya (Hanura)

Sedangkan hasil pileg pada 2009 wilayah kota Bandar Lampung sebagaimana berikut:⁵⁸

1. Mohammad Basiri Afandi (Gerindra)
2. Fahmi Sasmita (PKS)
3. Arianto (PAN)
4. Suwondo (Golkar)
5. Barlian Mansyur (Golkar)
6. Albert (PPP)
7. Yose Rizal (PDIP)
8. Budiman (Demokrat)
9. RM. Ayub Sulaiman (Demokrat)

Adapun hasil pilwali di Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 sebagaimana berikut.⁵⁹

1. SAUKI SHOBIER - SAMSU RIZAL Memperoleh suara : 2,62 %
2. HERMAN H.N. - THOBRONI HARUN Memperoleh suara : 34,67 %
3. KHERLANI - HERU SAMBODO Memperoleh suara : 29,71 %
4. EDY SUTRISNO - HANTONI HASAN Memperoleh suara : 27,77 %

⁵⁸ <http://indonesiabicara.com/pelantikan-anggota-dprd-kota-bandar-lampung-periode-2009-2014/> di akses tanggal 30-07- 2018 pukul 02.58

⁵⁹ <http://pakarinfo.blogspot.com/2010/06/quick-count-pilkada-kota-bandar-lampung.html> di akses tanggal 30-07- 2018 pukul 03.32

C. Himalaya (Himpunan Mahasiswa Lampung Surabaya)

Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu tulang punggung bangsa telah membuktikan mempunyai posisi penting dalam sejarah perkembangan bangsa. Seiring dengan hal itu, saat ini bangsa Indonesia membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang mampu berkompetisi dalam globalisasi dunia dengan tetap berfikir kritis dan idealis untuk menjadi ujung tombak pembangunan bangsa.

Himpunan Mahasiswa Lampung Surabaya yang lahir pada 13 juni 2010 ini merupakan gabungan dari mahasiswa berbagai universitas dan institut dengan dasar pendidikan yang berbeda-beda yang terdapat di Surabaya, merupakan wadah para mahasiswa asal Provinsi Lampung untuk mengembangkan diri dan beraktualisasi diri dengan dunia sosial dan pendidikan yang lebih kompleks. Kami juga menyadari sebagai bagian dari mahasiswa Indonesia, merasa berhak dan berkewajiban untuk turut berperan aktif dalam menentukan perjalanan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya manusia Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya yang berkualitas, baik dalam hal keilmuan maupun *soft skill* yang didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kekeluargaan, maka disusunlah organisasi Perhimpunan Keluarga Mahasiswa Lampung.⁶³

Himalaya sendiri memiliki asrama yang baru diresmikan pada bulan November tahun 2017 lalu yang beralamatkan di Jl. Dukuh Pakis II no 29 RT

⁶³ AD-ART Himalaya

Secara substansi pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa pengertian 'moral' senantiasa menunjukkan manusia sebagai subjek etika, maka kewajiban moral dibedakan dari kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar etika pada manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih menegaskan bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakekat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu

1. Etika Politik Menurut Anggota Himalaya

Pengertian etika politik yang disampaikan oleh Andre ini adalah cerminan dari etika yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang ketika berpolitik karena seharusnya dengan mengedepankan etika maka berpolitik haruslah menempatkan manusia sebagai manusia sehingga tidak memakai cara-cara rimba yang seolah-olah tidak berperilaku yang pantas sebagai manusia itu sendiri seperti yang dikatakan oleh anggota Himalaya yang lain

Aulia Riskitasari:

Menurut Aulia ketika seseorang mengedepankan etika dalam berpolitik maka seharusnya orang itu menguburkan setiap keinginan individu atau kelompok tertentu dan menggantikannya dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu masyarakat banyak senada dengan Aulia anggota Himalaya yang lain Muhammad Bayu Jastanta:

⁶⁶ Muhammad Bayu Jaastanta, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

Dengan mencermati adanya berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan, diperlukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa yang mengacu kepada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

“Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

Masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.

Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan

Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

3. Kode Etik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Untuk itulah disusun suatu Kode Etik Kader yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Kader Partai, demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan Kredibilitas Partai, Kode Etik ini merupakan norma-norma kehidupan sehari-hari; dituntut pencerminnya dalam pola pikir, sikap, perilaku dan pola tindak para kader Partai sebagaimana di bawah ini:

1. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Nasionalis Sejati yang setia kepada Idologinya.

[illegible]

- c. Setia kepada Partai dengan meniadakan menentang sebagai Rumah Besar Kaum Nasionalis.
 - d. Setia dan dapat dipercaya, pantang menyerah, berani dalam memperjuangkan ideologinya.
4. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah N bergotong royong yang bersama rakyat untuk kepentingan
- a. Berjiwa gotong royong menjadi tauladan dan memper untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.
 - b. Bergotong royong memperjuangkan pemberantasan perwujudan keadilan sosial dengan berbasis kepada ke pro rakyat.
 - c. Bergotong royong dalam setiap kegiatan partai sesuai

- a. Berhak mengajukan usul, pendapat dan pikiran. Berbeda pendapat dalam partai merupakan hal yang wajar dalam berdemokrasi, namun setelah pengambilan keputusan Partai dilakukan secara institusional, konstitusional dan demokratis, seluruh kader Partai loyal dan wajib hukumnya untuk melaksanakan keputusan Partai.
- b. Wajib menjaga kehormatan diri dimuka umum demi kehormatan partai.
- c. Dilarang membocorkan rahasia partai termasuk hal-hal yang dibicarakan dalam rapat partai dan diklasifikasi sebagai rahasia.
- d. Dilarang menggunakan tindak kekerasan dan Intimidasi dalam menyelesaikan masalah partai dan kepada rakyat dengan mengatasnamakan Partai
- e. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dan pengedaran narkoba dan psikotropika yang merusak mental Bangsa.
- f. Dilarang melakukan korupsi dan penyelewengan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan pelayanan publik.
- g. Dapat mengajukan keberatan atau proses secara santun dengan menghormati nilai Kemanusiaan, Keagamaan, dan tata krama budaya serta tidak menghujat dan menista sesama Kader di depan publik.⁷²

[illegible]

namun suaranya cukup terpaut jauh dengan pasangan Ridho - Bachtian

Herman HN adalah putra ketiga dari pasangan Hasanusi dan Pesayan. Ayahnya merupakan seorang pedagang bahan kebutuhan dengan menggunakan perahu ari Menggala hingga ke perkampungan di Teladas. Saat ia SMP, ia sempat membantu orangtuanya berdagang di pasar.

Bersama Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Herman HN dinobatkan menjadi salah satu Kota terbaik diantara 10 bupati serta Wali Kota dari Jawa Pos Group 2016. Dibawah kepemimpinannya, Kota Bandar Lampung mem

Herman HN adalah putra ketiga dari pasangan Hasanusi dan Ratu Pesayan. Ayahnya merupakan seorang pedagang bahan kebutuhan pokok dengan menggunakan perahu ari Menggala hingga ke perkampungan nelayan di Teladas. Saat ia SMP, ia sempat membantu orangtuanya berdagang di pasar.

Penghargaan dari Mahkamah Agung RI atas prestasi yang diperoleh untuk melayani masyarakat yaitu berperan aktif dalam memfasilitasi terlaksananya sidang keliling terpadu perkara itsbat nikah.

56

tapi Andre memiliki tanggapan yang serupa mengenai kinerja Herman HN
sebagaimana pendapatnya di bawah ini:

“Cukup baik, dilihat dari pembangunan infrastruktur fly over yang dibangun di titik-titik macet dan persimpangan jalan trans Sumatera menuju area dalam Kota. Juga sudah tersedianya ambulan gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, tidak hanya ber-KTP Bandar Lampung, tapi Lampung secara keseluruhan”.⁷⁵

Andre juga setuju jika pencapaian yang dicapai oleh Herman HN meliputi kesehatan seperti yang Ega katakan diatas akan tetapi Andre juga mengatakan:

“Menurut saya, Herman cukup baik dalam mengelola pemerintahan di Bandara Lampung. Namun *background* PDI yang melekat mulai membuat sebagian masyarakat “sinis” setelah peristiwa Ahok dan beberapa kaitan lainnya”.⁷⁶

Partai pendukung yang melekat pada Herman HN yakni PDI P bagi Andre malah membuat masyarakat mulai sinis karena seperti yang kita tahu belakangan ini memang PDI P terlibat berbagai masalah, terutama Ahok juga masalah-masalah yang berkaitan dengan PDI P lainnya. Narasumber lain tidak seperti Ega dan Andre anggota Himalaya yang lain malah menganggap kalau pemerintahan Herman HN dinilai biasa saja seperti yang dikatakan Rizki dibawah ini:

“Biasa aja, karena menurut saya pemerintahan Wali Kota bapak Herman HN ini tidak terlalu menonjol ya berbeda dengan Wali Kota lain misalnya bu

⁷⁵ Andre Nugraha Afriza, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

⁷⁶ Andre Nugraha Afriza, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

Pendapat Rizki pemerintahan Herman HN biasa saja karena bagi dia Herman HN tidak memiliki gebrakan yang menonjol dalam kepemimpinannya sebagai Wali Kota Baandar Lampung berbeda sekali dengan Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Bandung yang punya kebijakan sangat menonjol. Meski tidak sama tapi Agung punya pendapat yang mirip dengan Rizki seperti yang dia nyatakan dibawah ini:

Agung mengatakan bahwa Herman HN biasa saja selama menjadi Wali Kota hanya saja memang dalam kancah pemerintahan di Lampung beliau sudah sejak lama berkiprah di sana. Senada dengan Agung juga Rizki bagi Aulia juga biasa saja selama menjadi Wali Kota sebagaimana pernyataannya di bawah ini:

Seperti dua narasumber sebelumnya Aulia juga menganggap pemerintahan Wali Kota Bandar Lampung dinilainya biasa saja karena apa

⁷⁹ Aulia Riskitasari, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

“Biasa aja kalau menurut aku, malah yang saya tau beberpa kali antara pak Wali Kota dan pak Gubernur beberapa kali bersitegang seperti yang pernah beberapa kali masuk di berita lokal mulai dari masalah saling klaim pembangunan fly over sampek bersitegang di pilgub 2013 apalagi sekarang jadi rival lagi di pilgub tahun ini. Bagi saya si biasa saja kok dalam jadi Wali Kota”.⁸⁰

“Sebenarnya kalau saya sendiri itu masih bingung ya, antara Wali Kota dan Gubernur itu dia sampai maksudnya ini kan tinggalnya di Bandar Lampungnya, jadi kalau misalnya Wali Kota itu ya mengurus di Bandar Lampung dan Gubernur juga kan menetapnya di Bandar Lampung gitu, nah jadi bingungnya kenapa itu di Bandar Lampung itu kalau program kerja yang ada itu aku tuh gak ngerti. Jadi bingung kalau mengingat jaman dulu sih banyak berubah ya karena kita pulang pergi terus disini sih”.⁸¹

⁸⁰ Muhammad Bayu Jaastanta, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

[illegible]

“Menurut saya dia pekerja paling baik, benar-benar abdi masyarakat selama memimpin Bandar Lampung baik dan tidak aneh-aneh hanya saja memang sepertinya nasib beliau hanya sampai Wali Kota saja tidak lebih”.⁸²

“Sebagai pemimpin Herman HN termasuk pemimpin yang tegas dan cukup peduli dengan rakyat kecil, itu terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan rakyat kecil seperti berobat gratis dan pendidikan wajib 12 tahun, bagi rakyat itu adalah hal penting walaupun mungkin sepele bagi orang-orang kaya dan para pejabat elit, bahkan yang saya tahu tiap tahun pak Herman memberikan bantuan ke pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung 100 juta setiap tahun”.⁸³

“Saya memang kurang begitu mengikuti berita-berita mengenai beliau ya tapi saya pernah sedikit baca di koran kalo dia dapat berbagai penghargaan selama menjabat sebagai Wali Kota, saya pikir penghargaan sekecil apapun itu pasti punya nilai-nilai yang harus dipenuhi menurut saya itu sudah menjadi bukti kalo beliau memang cakap menjadi Wali Kota ya”.⁸⁴

⁸² Ahmad Hermawan, *Wawancara*, Via Telepon, 27 Juni 2018
⁸³ Muhammad Candra Syahputra, *Wawancara*, Via Telepon, 22 Juni 2018
⁸⁴ Muhammad Ikhwan, *Wawancara*, Via Telepon, 21 Juni 2018

etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dan perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan.

Sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok dengan keinginan dari pelaku,⁸⁶ atau Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi.

seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok dengan keinginan dari pelaku,⁸⁶ atau Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

pelaku mewujudkan cita-citanya didalam sebuah komunitas
kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang
kemungkinan itu.⁸⁷

⁸⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_politik di akses tanggal 26-01-2018 pukul 01.04

⁸⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia, 1977), Hlm. 35

⁸⁷ Roderick Martin, *sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 70

kekuasaan memungkinkan akan adanya penyelewengan.⁸⁸

menggampangkan jabatan yang sudah ada untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi lagi seperti yang dikatakan oleh Wahyu:

kedepannya dia ingin mencalonkan diri mungkin bisa. Karena apa, karena dia menjadi Wali Kota itu kan punya tugas dan fungsinya kalau dia ditengah-tengah seperti itu sibuk mencalonkan diri sebagai Gubernur bagaimana tugas dan fungsi Wali Kota pada saat dia bekerja”.⁸⁹

Gubernur seharusnya selesaikan dulu jabatannya sebagai Wali Kota karena kalo di tengah-tengah jabatannya malah mencalonkan diri menjadi Gubernur

⁸⁸ <http://febriramadhanii.blogspot.com/2015/10/kekuasaan-dan-korupsi-politik.html> 10-06-2018 pukul 06.46

⁸⁹ Wahyu Puji Astuti, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

itu membuat jabatannya sebagai Wali Kota menjadi tidak fokus. Sependapat dengan Wahyu anggota Himalaya lainnya, Agung mengatakan:

“Menurutku seharusnya jangan menjabat seperti Jokowi, kalau dia ibaratnya semua orang di Bandar Lampung sudah memilih dia pokonya dia dipercaya. Jadi seharusnya dia bisa tidak melanggar etika gitu kan. Karena dia tadinya janji ke Bandar Lampung gini-gini terus sekarang nyalon buat jadi Gubernur Lampung. Ya memang gimana ya manusia sih gitu memang kurang terus, dan seandainya dia kaya gitu menurutku kurang lah etikanya”.⁹⁰

Bagi Agung seharusnya jika Herman HN memakai etika politiknya sebagai seorang pemimpin maka sebaiknya ia tidak mencalonkan diri sebagai Gubernur karena dia di percaya menjadi Wali Kota sehingga dengan begitu dia tidak mengecewakan para pendukungnya dengan maju mencalonkan diri menjadi Gubernur. Kekecewaan lain tentang etika politik Herman HN juga disampaikan oleh Rizki:

“Menurutku kurang baik ya, karena di 2013 mencalonkan diri sebagai Gubernur padahal posisinya masih menjadi Wali Kota Bandar Lampung dan sekarang tahun ini dengan hal yang sama persis beliau lakukan lagi terkesan banget kalo rakus kekuasaan seharusnya kalo beliau memakai etika politiknya dalam menjalankan kekuasaannya sebagai Wali Kota beliau tidak akan melakukan hal itu”.⁹¹

Sama seperti narasumber sebelumnya Rizki juga tidak membenarkan kalo Herman HN maju untuk Gubernur dengan posisinya sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Sangat berbeda dengan tiga narasumber sebelumnya Bayu berpendapat berbeda seperti yang dia katakan dibawah ini:

“Hmm.. baik sih, dimasyarakat beliau terkenal ramah dan bisa mengayomi kok buktinya juga terpilih lagi untuk periode kedua kan itu artinya masyarakat tidak kecewa dengan hasil kinerja beliau selama ini dan bagi

⁹⁰ Agung Yudi Perwira, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

⁹¹ Rizki Mutiara, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

saya beliau beretika adapun kalo memang tidak beretika tidak mungkin masyarakat bisa percaya sampai sejauh ini”.⁹²

Dua periode terpilihnya Herman HN sebagai Wali Kota menurut Bayu adalah bukti bahwa etika politik yang diterapkan oleh Herman HN disukai oleh rakyat dan tidak mengecewakan karena pada dasarnya Herman HN bisa mengayomi rakyatnya. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Bayu narasumber lainnya, Ega mengatakan:

“Balik lagi, karena itu tadi, karena dia di dukung sama partai besar jadi terserah dia kan kalau dia mau jadi Wali Kota terus Gubernur balik lagi Wali Kota. Buktinya dia bisa melakukannya. Berarti dia punya dukungan dari masyarakat Bandar Lampung dan dia punya peluang untuk itu, dan semua orang bisa melakukan sesuatu asal dia punya kesempatan”.⁹³

Hampir sama dengan Bayu tapi Ega lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak jadi masalah dari Wali Kota lalu mencalonkan diri menjadi Gubernur dan ketika tidak terpilih beliau kembali menjadi Wali Kota karena selama dia mampu dan bisa melakukannya kenapa tidak. Rupanya kesetujuan tentang tidak mengapanya Herman HN mondar-mandir dari jabatan Wali Kota ke Gubernur dan karena tidak terpilih balik lagi menjadi Wali Kota membuat Hermna HN terkesan terlalu ambisius seperti yang dikatakan oleh Andre:

“Menurut saya, Herman terbuka dan tidak terlalu sinis terhadap lawan politik. Hanya ambisius untuk berkuasa yang terlihat jelas di buktikan dari nama herman selalu muncul di bursa pilwali dan pilgub Lampung”.⁹⁴

Berbeda dengan narasumber lain malah mengatakan seharusnya Herman HN tidak perlu mencalonkan diri di kursi Gubernur karena kalo mau

⁹² Muhammad Bayu Jaastanta, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

⁹³ Ega Wely Agustin, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

⁹⁴ Andre Nugraha Afriza, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

“Ya kalau menurut saya, kalau dia di Kota mungkin dia bisa ya untuk berkuasa, karena itu mungkin sudah di ranahnya beliau. Tapi kalau untuk di Provinsi berarti itu berubah gitu ya, tidak dapat gregetnya gitu ya misalnya, ya dia hanya jago kandang gitu ya karena dia kalah diperiode yang pertama”.⁹⁵

“Kalo pendapat saya Herman HN sah-sah saja untuk bolak balik dari Wali Kota ke pilgub ya karena dalam perpolitikan itu semua bisa terjadi walaupun pernah gagal di ajang yang sebelumnya, tapi kalo mau melihat secara teori ya memang seolah-olah Herman HN ambisius, betul sekali atau mencoba meihat dari etika politik kita kan bicara pantas tidak pantas tapi kalo saya melihatnya kok lebih ke beliau ingin mengabdikan dirinya ke seluruh Lampung artinya cakupannya lebih luas bukan hanya Bandar Lampung saja”.⁹⁶

“Sah-sah saja Herman HN berbuat demikian secara etika politik maupun secara hukum selama dia tidak money politic dan black campaign, kita tidak boleh membatasi kalo orang punya niat baik mau mengabdikan dirinya ke masyarakat kalo kita tidak bisa seperti beliau ya kita dukung dong beliau untuk berbuat baik seperti itu”.⁹⁷

⁹⁷ Ahmad Hermawan, *Wawancara*, Via Telepon, 27 Juni 2018

“Kalo kita melihat pak Herman HN dari sudut pandang etika politik dan kekuasaan saya rasa beliau orang yang beretika kok karena dia menjabat jadi Wali Kota bukan tanpa pengalaman ya, beliau memang sudah berkecimpung di pemerintahan sejak gubernur Lampung masih pak Sjahroedin ya artinya pengalaman dia yang begitu pasti sudah membuat dia piawai untuk menjalankan kota Bandar Lampung ini kalopun kemudian beliau terlihat ambisius dengan dua kali berpartisipasi di pilgub saya rasa itu karena memang kodrat kita sebagai manusia memang tidak pernah puas ya begitu juga dengan beliau tapi kita doakan saja lah semoga beliau selalu mendapat yang terbaik.

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

[illegible]

itu Schemel memaknai dampak adalah tingkat perusakan terhadap tanah lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan tertentu dan Hari Sabari mendefinisikan dampak adalah sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian.⁹⁸

Peneliti menarik sebuah garis besar bahwa apa yang didefinisikan oleh para ahli di atas bahwa dampak adalah sesuatu yang muncul setelah adanya suatu fenomena atau kejadian yang terjadi sebab maka lahirlah akibat dan dalam konteks ini adalah tentang dampak etika politik Wali Kota Bandar Lampung dari perspektif Himalaya sebagaimana yang telah disampaikan di bawah ini:

eliti menarik sebuah garis besar bahwa apa
oleh para ahli di atas bahwa dampak adalah ses
ul setelah adanya suatu fenomena atau kejadian
di sebab maka lahirlah akibat dan dalam konteks
tanggung jawab etika politik Wali Kota Bandar
Himalaya sebagaimana yang telah disampaikan

“Dampak dari etika herman HN menurut saya ya pemerintahan yang dia pimpin tidak bisa maksimal karena fokusnya terbagi ya seharusnya memikirkan bagaimana program pemerintahan Bandar Lampung bisa menjadi baik malah mikirin gimana bisa jadi Gubernur”.⁹⁹

Narasumber lain mengatakan hal yang serupa secara substansi meski tidak sama persis seperti yang disampaikan oleh Agung di bawah ini:

⁹⁸ <http://nurarifanalathifa.blogspot.com/2012/06/karya-ilmiah-remaja-bab-2-dampak.html>
di akses tanggal 25-01-2018 pukul 23.55

⁹⁹ Aulia Riskitasari, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

“Kalo dalam beretika saja sudah tidak benar menurut saya akan sangat susah kesejahteraan sampai ke tangan rakyat ya, karena setiap tindak tanduknya sudah bukan lagi berdasarkan kepentingan rakyat”.¹⁰⁰

Menurut Agung jika seseorang sudah melepas etikanya atau tidak mendasari setiap gerak dalam memerintah dengan etika maka hampir bisa dipastikan pemerintahan yang dijalankan jauh dari kesejahteraan rakyat, berbeda dengan Agung narasumber yang bernama Bayu di bawah ini berpendapat sebagai berikut:

“Etika itu sakral ya, hal yang harus dijadikan landasan kita dalam berbuat sehingga bisa bertanggung jawab dengan hasil perbuatan itu tapi kalo etikanya kurang rasanya bertanggung jawab dengan hasil perbuatannya juga kurang padahal pemimpin harus sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya”.¹⁰¹

Menurut Bayu etika adalah pokok atau dasar dari tingkah laku sehari-hari oleh karenanya jika etikanya tidak bagus maka tanggung jawab sebagai pemimpin sulit untuk kemudian bisa ada, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bayu narasumber yang bernama Rizki berpendapat sebagai berikut:

“Karena saya memaknai etika itu sebagai prinsip pegangan hidup yang harus selalu jadi pedoman saat saya melakukan sesuatu maka saya menilai ketika seorang pemimpin menanggalkan atau etikanya katakanlah kurang bagus maka dia akan mudah menyelewengkan kekuasaan yang dia miliki jadi wewenang yang dia miliki tanpa etika sebagai prinsip yang kokoh saya rasa seorang pemimpin akan mudah sekali dikendalikan dengan pihak lain”.¹⁰²

Narasumber yang satu ini berbeda dengan naraumber-narasumber sebelumnya karena dia lebih menekankan bahwa sebagai seorang pemimpin

¹⁰⁰ Agung Yudi Perwira, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

¹⁰¹ Muhammad Bayu Jaastanta, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

¹⁰² Rizki Mutiara, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

yang tidak berpegangan pada etika yang benar maka akan sangat muda diintervensi oleh pihak luar berbeda lagi dengan yang berpendapat sebagaimana dibawah ini:

“Etika kan bagaimana kita bertingkah laku ya sehingga dampak yang ditimbulkan jika kita tidak beretika atau katakanlah pemimpin yang tidak beretika kalo menurut saya ya kasian sama yang dipimpin dan pastinya menyalahin aturan dong karena seharusnya ketika seseorang minta dipilih untuk menjadi pemimpin maka setidaknya tingkah laku dia selama ini baik lah misalnya peka dengan orang lain atau tanggap dengan dan hal-hal sejenisnya sehingga ketika dia jadi pemimpin salah satu etikanya kan harus bisa mengayomi rakyat dan mengayomi rakyat itu tidak mudah kalo masalah etika saja dia tidak selesai dengan dirinya sendiri bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya dengan rakyat”¹⁰³

Penjelasan yang panjang yang disampaikan oleh narasumber diatas adalah bahwa dia meragukan kecakapan seseorang pemimpin jika etikanya kurang baik oleh karenanya menurut narasumber di atas seharusnya seorang calon pemimpin selesai dulu tentang dirinya dan etikanya sehingga mampu memahami rakyat ketika dia terpilih, berbeda dengan Ega, Narasumber lain yang bernama Andre berasumsi sebagaimana di bawah ini:

“Kalo saya gampang saja kalo etika oaranya buruk maka situasi dan keadaan sekitarnya pasti buruk orang-orang yang begini ni ya jangan di jadikan pemimpin kalo tetap di jadikan pemimpin ya tunggu saja akibat dari tingkah lakunya bisa korupsi bisa nepotisme bisa kolusi dan entah apalagi, kalopun memang hari ini orang-orang yang tidak mengedepankan etika ini masih bisa naik menjadi pemimpin bukan salah dia salah kita sebagai rakyat kenapa masih memilih yang begituan”.¹⁰⁴

Narasumber yang satu ini menyoroti bahwa etika sangat penting dan kalo seseorang kurang dalam beretika maka ya jangan dipilih sedangkan menurut narasumber kenapa pemimpin yang demikian masih terpilih karena

¹⁰³ Ega Wely Agustin, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

¹⁰⁴ Andre Nugraha Afriza, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

etika yang baik dan benar kalo memang dia pemimpin berarti etikanya dia harus selalu mengutamakan rakyatnya dalam segala hal”.¹¹

Menurut peneliti Wahyu ingin menekankan bahwa pemimpin yang berorientasi kebaikan akan selalu mendahulukan kepentingan bersama bukan kepentingan dirinya atau kelompok tertentu hal yang secara substansi sama persis apa yang disampaikan Plato tentang orientasi pada kebaikan, hampir sama dengan Wahyu akan tetapi agak sedikit berbeda Bayu mengatakan:

“Etika menurut saya salah satu cara berperilakunya kita dalam melakukan tindakan politik ya, sehingga setiap perilakunya diukur dengan baik dan buruk sebagaimana etika itu sendiri selalu membicarakan tentang moral atau kalau islam disebut akhlak”.¹¹²

Bayu mengatakan bahwa setiap perilaku itu kan diukur dengan kebaikan yang kemudian dia menarik kedalam istilah islam disebut *akhlak* yang mencerminkan perilaku baik dan ini selaras dengan apa yang sudah dikatakan oleh Plato tentang orientasi kebaikan.

Ahli filsafat lain juga mencoba menguraikan apa yang dimaksud etika politik seperti yang peneliti kutip dibawah ini:

“Menurut Aristoteles dengan adanya negara, manusia dapat hidup bahagia, maka tingkah laku manusia harus memiliki keutamaan-keutamaan etis. Negara yang paling baik adalah negara yang organisasinya sesuai dengan fungsinya. Serta dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan memiliki keutamaan yang

¹¹¹ Wahyu Puji Astuti, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

¹¹² Muhammad Bayu Jaastanta, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

diperlukan. Negara yang paling baik adalah negara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹¹³

Menurut peneliti apa yang menjadi ukuran bagi Aristoteles adalah keutamaan-keutamaan etis sehingga dengan demikian semua bagian dalam suatu negara atau pemerintahan berfungsi sebagaimana fungsinya dengan menjadikan kebutuhan masyarakatnya sebagai kebutuhan negara atau daerah tersebut, salah satu narasumber yang bernama Rizki meski tidak sama persis tapi mengatakan hal yang secara substansi sama dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles sebagaimana yang peneliti kutip dibawah ini:

“tentang tindakan atau perilaku yang mengenai hal-hal berpolitik. Jadi setiap tindakan itu kan membutuhkan etika sehingga akan terlihat indah atau terlihat lebih baik karena pada dasarnya yang membedakan manusia baik atau jahat adalah beretika atau tidaknya seseorang”.¹¹⁴

Tindakan yang disertai etika akan terlihat indah dan etika juga yang membedakan seberapa baik seseorang atau seberapa buruk seseorang, ini sama dengan apa yang disampaikan Aristoteles tentang tingkah laku manusia yang memiliki keutamaan-keutamaan etis, Ega juga mengatakan hal yang hampir sama seperti yang dikatakan oleh Aristoteles tentang mengangkat pemimpin yang berpengalaman seperti yang peneliti kutip di bawah ini:

“Etika politik itu kan cara-cara baru kita berpolitik kan. Kalau cara kita mahasiswa berarti harus mengikuti dengan baik kan. Terus kalau mau memilih pemimpin kita kita harus tau latar belakangnya, rekam jejaknya, terus visi misi,

¹¹³ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, hlm. 190.

¹¹⁴ Rizki Mutiara, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

sportif. Jadi kita memilih itu tidak hanya datang ke pemilu terus memilih gitu, tapi kita juga tau mana yang harus dipilih”.¹¹⁵

Memilih pemimpin tidak cukup hanya kemudian datang ke tempat pemungutan suara lalu memilih secara asal-asalan karena perlu melihat rekam jejak sang calon sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berpengalaman seperti apa yang dikatakan oleh Aristoteles.

2. Indikator Etika Politik Pejabat Publik Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV Tahun 2001 dan Kode Etik PDI P

Berdasarkan penyajian data dalam bab III tentang etika berbangsa yang tertuang dalam ketetapan MPR No. IV tahun 2001 dan kode etik yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia maka dapat dibentuk indikator etika politik seorang pejabat publik sekaligus kader partai sebagai berikut:

No	Ketetapan MPR No. IV Tahun 2001	Kode Etik Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1.	Jujur	Setia kepada ideologi
2.	Amanah	Berjiwa gotong royong
3.	Sportif	Mewujudkan keadilan sosial
4.	Siap melayani	Sederhana
5.	Berjiwa besar	Bersahaja

¹¹⁵ Ega Wely Agustin, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

Narasumber dari Himalaya Andre menilai bahwa kepemimpinan Herman menurutnya sudah cukup baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Lampung terbuti dengan adanya beberapa fasilitas untuk masyarakat hal ga terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ahmad awan dalam wawancara via telepon:

Menurut bapak Ahmad Hermawan, Herman HN adalah sosok yang benar-baik dan bahkan beliau membahasakan dengan kata abdi masyarakat yang aneh-aneh, menurut penulis ini adalah cerminan bahwa bagi sebagian rakyat Bandar Lampung memang Herman HN adalah sosok Wali Kota yang meski tidak sama hal yang serupa juga disampaikan oleh anggota Himalaya lain seperti yang dikatakan oleh Ega:

“Kalau menurut saya apa ya, kelihatan banget ya kalau pak HN itu dibawah oleh partai yang mumpuni ya, misalnya kaya PDI yang bukan kaya partai abal-abal lah. Maksudnya ada yang mempunyai dukungan partai yang kamu tau lah yang bahkan jadi Presiden. Kalau misalkan kita bukan dari orang awam kan, mau gak mau pasti kelihatan kan skripnya pasti dibaca lah kenapa kok bisa sampai dua periode mencalonkan sebagai Gubernur kemudian gak jadi terus mencalonkan lagi Wali Kota terus gak jadi lagi, gitu-gitu lah. Pokok kalau menurut aku baiklah, baiknya itu karena tidak semua pemimpin kan perfect gitu, tidak ada

¹¹⁷ Ahmad Hermawan, *Wawancara*, Via Telepon, 27 Juni 2018

kan. Cuman aku ngerasa banget dari segi kesehatannya di kemudaanya keliatan banget. Karena aku pernah praktek di salah satu rumah sakit dan administrasinya asal dia warga Bandar Lampung itu transaksinya cepet gitu loh, dipermudah”.¹¹⁸

Pendapat yang disampaikan oleh Ega walaupun tidak sama persis akan tetapi secara garis besar sama dengan apa yang disampaikan oleh Andre juga bapak Ahmad Hermawan bahwa bapak Herman Hasanusi adalah sosok pemimpin yang baik karena di bawah kepemimpinannya lahir banyak kebijakan yang di anggap berpihak kepada masyarakat, bahkan hal ini juga dikonfirmasi oleh tokoh pemuda Lampung yang menjabat sebagai sekretaris PSP Lampung (pusat studi pesantren) Lampung seperti yang dikatakan di bawah ini:

“Sebagai pemimpin Herman HN termasuk pemimpin yang tegas dan cukup peduli dengan rakyat kecil, itu terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil berdasarkan rakyat kecil seperti berobat gratis dan pendidikan wajib 12 tahun, bagi rakyat itu adalah hal penting walaupun mungkin sepele bagi orang-orang kaya dan para pejabat elit, bahkan yang saya tahu tiap tahun pak Herman memberikan bantuan ke pondok pesantren yang ada di Bandar Lampung 100 juta setiap tahun”.¹¹⁹

Tokoh pemuda ini menilai bahwa Herman HN adalah sosok pemimpin yang tegas dan cukup peduli dengan rakyat kecil, lagi-lagi pendapat tentang banyaknya fasilitas yang diberikan kepada masyarakat menjadi alasan bahwa memang Herman HN adalah Wali Kota yang baik, narasumber lain juga mengakui hal demikian seperti yang disampaikan oleh Wahyu:

“Sebenarnya kalau saya sendiri itu masih bingung ya, antara Wali Kota dan Gubernur itu dia sampai maksudnya ini kan tinggalnya di Bandar Lampungnya, jadi kalau misalnya Wali Kota itu ya mengurus di Bandar Lampung dan Gubernur juga kan menetapnya di Bandar Lampung gitu, nah jadi bingungnya

¹¹⁸ Ega Wely Agustin, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

¹¹⁹ Muhammad Candra Syahputra, *Wawancara*, Via Telepon, 22 Juni 2018

kenapa itu di Bandar Lampung itu kalau program kerja yang ada itu aku tuh gak ngerti. Jadi bingung kalau mengingat jaman dulu sih banyak berubah ya karena kita pulang pergi terus disini sih".¹²⁰

Narasumber yang bernama Wahyu secara tidak langsung menegaskan bahwa ada banyak perubahan yang di lihat saat dia pulang ke Bandar Lampung karena kuliah di Surabaya dan jarang pulang sehingga saat pulang perbedaan yang terjadi di rasa begitu banyak dan menurut penulis ini bentuk dari salah satu ungkapan bahwa bapak Herman HN ini berhasil menjadi Wali Kota Bandar Lampung, seperti yang dikatakan oleh seorang warga Bandar Lampung yang berprofesi sebagai guru di bawah ini:

“Saya memang kurang begitu mengikuti berita-berita mengenai beliau ya tapi saya pernah sedikit baca di koran kalo dia dapat berbagai penghargaan selama menjabat sebagai Wali Kota saya penghargaan sekecil apapun itu pasti punya nilai-nilai yang harus dipenuhi menurut saya itu sudah menjadi bukti kalo beliau memang cakap menjadi Wali Kota ya”.¹²¹

Pendapat yang disampaikan oleh bapak Muhammad Ikhwan tentang penghargaan yang diperoleh bapak Herman HN selama menjabat Wali Kota menurut peneliti ini sebagai bentuk ungkapan bahwa beliau juga mengakui bahwa Herman HN adalah Wali Kota yang baik secara sosial masyarakat juga secara perestasi dalam pemerintahan. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh anggota Himalaya yang lain seperti yang disampaikan oleh Aulia di bawah ini:

¹²⁰ Wahyu Puji Astuti, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

¹²¹ Muhammad Ikhwan, *Wawancara*, Via Telepon, 21 Juni 2018

“Balik lagi, karena itu tadi, karena dia di dukung sama partai besar jadi terserah dia kan kalau dia mau jadi Wali Kota terus Gubernur balik lagi Wali Kota. Buktinya dia bisa melakukannya. Berarti dia punya dukungan dari masyarakat Bandar Lampung dan dia punya peluang untuk itu, dan semua orang bisa melakukan sesuatu asal dia punya kesempatan”.¹²⁶

Pendapat yang disampaikan oleh Ega ini menegaskan bahwa Etika politik dan kekuasaan yang diterapkan oleh Herman HN sudah baik itu terbukti dengan mampunya Herman HN dalam melakukan tugas-tugasnya adapun terkait dengan pencalonannya maju ke kursi Gubernur kalo memang bisa kenapa tidak, begitu tegas Ega. Pendapat yang disampaikan oleh ega ini terkonfirmasi dengan pendapat yang disampaikan oleh Candra sebagaimana berikut:

“Kalo pendapat saya Herman HN sah-sah saja untuk bolak balik dari Wali Kota ke pilgub ya karena dalam perpolitikan itu semua bisa terjadi walaupun pernah gagal di ajang yang sebelumnya, tapi kalo mau melihat secara teori ya memang seolah-olah Herman HN ambisius sekali atau mencoba melihat dari etika politik kita kan bicara pantas tidak pantas tapi kalo saya melihatnya kok lebih ke beliau ingin mengabdikan dirinya ke seluruh Lampung artinya cakupannya lebih luas bukan hanya Bandar Lampung saja”.¹²⁷

Tokoh pemuda yang berkecimpung di pesantren ini mengatakan bahwa etika politik dan kekuasaan yang di terapkan oleh Herman HN sudah cukup baik kalo mau membahas permasalahan terkait majunya Herman HN ke pilgub Lampung Candra ingin mengajak peneliti dari sudut pandang yang berbeda yaitu menempatkan keinginan Herman HN sebagai niat baik beliau untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat yang lebih luas yakni masyarakat

¹²⁶ Ega Wely Agustin, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

¹²⁷ Muhammad Candra Syahputra, *Wawancara*, Via Telepon, 22 Juni 2018

Menurut saya, Herman terbuka dan tidak terlalu sinis terhadap lawan politik. Hanya ambisius untuk berkuasa yang terlihat jelas di buktikan dari nama Herman selalu muncul di bursa pilwali dan pilgub Lampung.¹³⁰

Menurut Andre, Herman terbuka dengan lawan politiknya dan tidak sinis menurut peneliti itu adalah bentuk ungkapan bahwa Herman HN memiliki sifat yang dewasa dalam berpolitik atau katakanlah etika politik dan kekuasaannya memang sudah bagus tapi Andre juga mengatakan bahwa sifat ambisius yang melekat pada Herman HN menjadi kekurangan tersendiri bagi Herman HN, berkaitan tentang ambisius Herman HN narasumber lain memiliki pendapat yang hampir sama seperti yang dikatakan oleh Andre diatas sebagaimana yang peneliti kutip di bawah ini:

“Kalo kita melihat pak Herman HN dari sudut pandang etika politik dan kekuasaan saya rasa beliau orang yang beretika kok karena dia menjabat jadi Wali Kota bukan tanpa pengalaman ya, beliau memang sudah berkecimpung di pemerintahan sejak Gubernur Lampung masih pak Sjahroedin ya artinya pengalaman dia yang begitu pasti sudah membuat dia piawai untuk menjalankan kota Bandar Lampung ini kalopun kemudian beliau terlihat ambisius dengan dua kali berpartisipasi di pilgub saya rasa itu karena memang kodrat kita sebagai manusia memang tidak pernah puas ya begitu juga dengan beliau tapi kita doakan saja lah semoga beliau selalu mendapat yang terbaik”.¹³¹

Narasumber di atas menegaskan bahwa Herman HN adalah pemimpin yang beretika itu terbukti karena Herman HN sudah sejak lama berkecimpung di pemerintahan meski diakuinya bahwa Herman HN memiliki sisi ambisius yang tinggi untuk bisa jadi Gubernur Lampung, berkaitan dengan ambisius yang dimiliki oleh Herman HN seorang narasumber bernama Aulia berpendapat demikian:

¹³⁰ Andre Nugraha Afriza, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

¹³¹ Muhammad Ikhwan, *Wawancara*, Via Telepon, 21 Juni 2018

Wali Kota Bandar Lampung menurut Aulia adalah jabatan yang pas untuk Herman HN tanpa harus berambisi naik menjadi Gubernur Lampung karena bagi Herman HN jabatan yang saat ini di miliki oleh Herman HN sebagai Wali Kota Herman HN sudah sangat tau seluk beluk Bandar Lampung sedangkan untuk memahami wilayah Lampung adalah wilayah yang jauh lebih luas lagi dan menurut Aulia Herman HN itu belum layak untuk Herman HN, meski tidak sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Aulia, anggota Himalaya lainnya berpendapat seperti yang dikatakan oleh Agung di bawah ini:

Pendapat yang disampaikan oleh Agung meski tidak sama persis tapi
ut peneliti secara substansi sama dengan apa yang disampaikan oleh Aulia
etika politik dan kekuasaan yang diterapkan oleh Herman HN dalam
mpin Bandar Lampung belum begitu baik karena menurut mereka Herman
masih terus menerus berambisi mengejar jabatan yang lebih tinggi lagi,

¹³³ Agung Yudi Perwira, *Wawancara*, Asrama Putra Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 27 April 2018

“Dampak dari etika herman HN menurut saya ya pemerintahan yang dia pimpin tidak bisa maksimal karena fokusnya terbagi ya seharusnya memikirkan bagaimana program pemerintahan Bandar Lampung bisa menjadi baik malah mikirin gimana bisa jadi Gubernur”.¹³⁸

Dalam kasus ini ada perjanjian yang dituang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bandarlampung dengan pengembang pasar. Dalam SK Walikota No: 102/BG.IV/HK/1991 tentang PKS pasal 16, ayat 1 menyebutkan, setelah jangka waktu 20 tahun bersamaan dengan habisnya HGB maka tanah dan bangunan dikelola pihak ke-dua sebanyak 59 unit langsung beralih ke pihak pertama (Pemkot Bandarlampung) tanpa ada proses tertentu maupun persyaratan lain yang menjadi beban pihak pertama.

sehingga terjadilah kecurangan dan intrik yang hebat yang dilakukan oleh pemkot seolah-olah seluruh ruko kawasan pasar tengah bahkan ruko-ruko pasar ayam dan pasar panjang menjadi milik pemkot setelah masa 20 tahun berakhir.¹³⁹

Menurut peneliti tindakan di atas menabrak pakem etika yang telah tercantum dalam etika berbangsa yang tertulis di ketetapan MPR No. VI tahun 2001 dan kode etik yang ditetapkan oleh PDI P yakni tentang nilai tidak

¹³⁹ <https://www.kaskus.co.id/thread/54b1f0fe14088d467e8b456f/walikota-setengah-dewa-aarogansi-pemkot-bandarlampung/5> di akses tanggal 29-07-2018 pukul 20.03

“Karena saya memaknai etika itu sebagai prinsip pegangan hidup yang harus selalu jadi pedoman saat saya melakukan sesuatu maka saya menilai ketika seorang pemimpin menanggalkan atau etikanya katakanlah kurang bagus maka dia akan mudah meneyelewengkan kekuasaan yang dia miliki jadi wewenang yang dia miliki tanpa etika sebagai prinsip yang kokoh saya rasa seorang pemimpin akan mudah sekali dikendalikan dengan pihak lain”.¹⁴⁰

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir Sutono melibatkan diri dalam ranah politik merupakan perilaku yang tidak elok ditunjukkan oleh seorang Sekdaprov aktif. Sutono yang seharusnya memberi contoh kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lampung dengan menunjukkan sikap netralitasnya namun sebaliknya, ia hadir dan menjadi wakil Cawagub dari PDI Perjuangan dalam deklarasi yang digelar oleh PDI Perjuangan tersebut.¹⁴¹

¹⁴⁰ Rizki Mutiara, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

[illegible]

5. Pelanggaran Netralitas dalam Acara Peresmian *Flyover Mall* Boemi Kedaton (MBK)

Menurut peneliti tindakan di atas menabrak pakem etika yang telah tercantum dalam etika berbangsa yang tertulis di ketetapan MPR No. VI tahun 2001 dan kode etik yang ditetapkan oleh PDI P yakni tentang nilai sportif, berjiwa besar, demokratis dan mengutamakan kepentingan rakyat, kasus ini adalah bukti dengan apa yang telah disampaikan oleh Andre sebagaimana berikut:

¹⁴⁵ <http://www.lampost.co/berita-herman-hn-sebut-belum-mengetahui-pemanggilan-sidang-klarifikasi-dari-panwas> di akses tanggal 29-07-2018 pukul 19.11

rusnya dimiliki oleh setiap pejabat atau pemimpin daerah karena
kian maka kasus seperti netralitas di atas akan sering terjadi dan
di sampaikan oleh Wahyu di bawah ini:

“Bagi saya etika seharusnya dijadikan hal yang sangat mendasar dan
seorang pemimpin ya karena kalo etika dan nilai-nilai moral sudah
dan tidak lagi menjadi referensi para pejabat publik maka saya rasa
disesalkan sekali”¹⁴⁷

“Bagi saya etika seharusnya dijadikan hal yang sangat mendasar dalam karakter seorang pemimpin ya karena kalo etika dan nilai-nilai moral sudah terlupakan dan tidak lagi menjadi refrensi para pejabat publik maka saya rasa itu sangat disesalkan sekali”¹⁴⁷

¹⁴⁷ Wahyu Puji Astuti, *Wawancara*, Asrama Putri Himpunan Mahasiswa Lampung-Surabaya, 26 April 2018

Herman HN dalam berperilaku politik belum menerapkan dengan baik dalam menjalankan kekuasaannya itu terkonflik dengan berbagai pendapat yang telah diberikan oleh para narasumber. Hal ini menunjukkan garis besar Herman HN dalam menjalankan kekuasaannya cenderung mengedepankan ambisius untuk meraih jabatan yang lebih tinggi ketimbang menjalankan jabatan yang sedang beliau emban. Menurut beberapa narasumber menganggap hal itu sebagai niat baik untuk kemajuan tetapi menurut peneliti kalau Herman HN mau menyelesaikan masalah yang ada di satu persatu lalu kalau kemudian mau mencalonkan di jabatan yang lebih tinggi lagi maka itu akan lebih baik lagi.

4. Peneliti juga menemukan bahwa dampak yang terjadi

- nukan bahwa dampak y

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengharapkan dan menyarankan agar bisa menjadi tambahan wawasan dan juga referensi berpikir bagi para pembaca terlebih untuk kita sebagai seorang pelajar politik dalam memahami etika politik dan kekuasaan, dan sebagai warga Indonesia diharapkan agar memahami arti urgensi mengedepankan etika politik dalam kekuasaan. Dengan demikian hak politiknya sebagai warga Negara akan selalu digunakan secara baik dan benar, sebagaimana mengingat pentingnya posisi dan peran etika itu sendiri dalam kehidupan, yakni sebagai pemandu jalan kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. 1991. *Etika*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ata Ujan, Andre. 2001. *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asmaran AS. 1994. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Loren, Bagus. 2002. *Kamus Filsafat*, Cetakan ketiga. Jakarta; Gramedia.
- Bertens, K. 1999. *Etika*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo. Miriam. 1983 *“Konsep Kekuasaan :Tinjauan Kepustakaan*, Jakarta: Sinar harapan.
- Salam, Burhanuddin, 1997 *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zubair Ahmad, Charis. 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- D. Laswell. Harold, Kaplan. Abraham. 1950. *Power and Society* New Haven. Yall University Press
- Dahl, Robert A. 1950. *Modern Political Analysis*. New Haven: Yall University Press.
- Durkhem, Emile. 1990. *Pendidikan Moral*. Jakarta: Erlangga.
- fakhry, Majid. 1996. *Etika Dalam Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Guillot, Claude. 1990. *The sultanate of Banten*. Gramedia Book Publishing Division.
- Virginia, Held. 1991. *Etika Moral;Pembenaran Tindakan Sosial*. Penerjemah Drs.Y Ardy Handoko, Cetakan kedua. Jakarta; Erlangga.
- Yunahar, Ilyas. 2001. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI.
- Rahmat, Jatnika. 1985. *Sistem Etika islam; Akhlak Mulia*. Surabaya: Pustaka Islam.

